

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Oleh:

I Wayan Budha Yasa,<sup>1</sup> Sri Wiyanti Eddyono<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini menganalisis problematika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana perikanan di Jakarta Utara. Kajian ini juga mereview penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam proses penyidikan perkara tindak pidana perikanan di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Bahan penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di instansi-instansi yang berkaitan dengan topik penelitian guna memperoleh data dari responden dan narasumber penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif, sedangkan untuk interpretasi dan penyajian datanya dilakukan secara deskriptif analitis.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana perikanan di Jakarta Utara sudah diterapkan, namun belum secara maksimal. Hal tersebut disebabkan adanya dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor struktur hukum yaitu kurangnya pemahaman, usaha dan keterampilan serta ketegasan dari PPNS Perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta dan penyidik Polri di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri. Kedua, faktor substansi hukum yaitu UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki kekurangan atau kelemahan yang berkaitan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi, kriteria penentuan kesalahan korporasi dan pengurus korporasi, serta waktu penahanan untuk keperluan penyidikan. Di masa yang akan datang, pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dalam proses penyidikan perkara tindak pidana perikanan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hal tersebut perlu didukung dengan melakukan terobosan-terobosan seperti melakukan penguatan dan peningkatan kualitas penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, evaluasi dan revisi undang-undang perikanan, serta pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Proses Penyidikan, Tindak Pidana Perikanan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Pidana, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

## **CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN FISHERIES CRIME CASES**

By:

I Wayan Budha Yasa,<sup>1</sup> Sri Wiyanti Eddyono<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the problems of the application of corporate criminal liability in the investigation process of fisheries crimes in North Jakarta. This study also reviews the application of ideal corporate criminal liability in the investigation process of fisheries crime cases in the future.*

*The research method used in this study is normative-empirical legal research. This research is descriptive and prescriptive. This research material consists of primary and secondary data obtained through interviews and document studies. This research was conducted in agencies related to the research topic in order to obtain data from respondents and research sources. Data analysis is carried out descriptively, while the interpretation and presentation of the data is carried out in an analytical descriptive manner.*

*This study concludes that corporate criminal liability in the process of investigating fisheries crime cases in North Jakarta has been implemented, but not to the maximum. This is due to two factors that affect. First, the legal structure factor is the lack of understanding, effort and skills as well as firmness from the Fisheries Civil Servant Investigators at the Jakarta Marine and Fisheries Resources Monitoring Base and investigators at the Directorate of the Marine Police, Police and Air Corps, Security Maintenance Agency of the National Police of the Republic of Indonesia. Second, the legal substance factor, namely Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, has shortcomings or weaknesses related to the corporate criminal liability model, the criteria for determining corporate faults and corporate management, as well as the detention time for investigation purposes. In the future, the ideal corporate criminal liability in the process of investigating fisheries crimes can be carried out by paying attention to the applicable legal provisions. However, this needs to be supported by making breakthroughs such as strengthening and improving the quality of authorized investigators in investigating fisheries crimes, evaluating and revising fisheries laws, and updating the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability, Investigation Process, Fisheries Crimes.*

---

<sup>1</sup> Master of Law Students, Postgraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Lecturer of the Department of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.